

BAB III

LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN

3.1. Landasan Teori

3.1.1. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja perusahaan dapat dikatakan sebagai suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Menurut Sucipto (2003:6) pengertian kinerja keuangan adalah “penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba”.

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai “performing measurement“, yaitu kualifikasi dan efisiensi serta efektifitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Dengan demikian pengertian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu (Hanafi, 2007:69).

Penilaian kinerja menurut Srimindarti (2006:34) adalah “penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik”. Ada dua macam kinerja, yakni kinerja operasional dan kinerja keuangan. Kinerja operasional lebih ditekankan pada kepentingan internal perusahaan seperti kinerja cabang/divisi yang diukur dengan kecepatan dan kedisiplinan. Sedangkan kinerja keuangan lebih kepada evaluasi laporan keuangan perusahaan pada waktu dan jangka tertentu.

Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan maka secara umum perlu dilakukan analisis terhadap laporan keuangan, yang menurut Brigham dan Houston (2007:78) mencakup (1) perbandingan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama dan (2) evaluasi kecenderungan posisi keuangan perusahaan sepanjang waktu. Laporan keuangan perusahaan melaporkan baik posisi perusahaan pada suatu waktu tertentu maupu operasinya selama beberapa periode yang lalu.

Dalam hubungannya dengan Kinerja Keuangan di daerah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Oesi Agustina (2013:3) dalam jurnalnya, Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundangundangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

3.1.2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan

tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 (delapan) macam, menurut Jumingan (2006:242) yaitu:

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun dalam persentase (relatif).
2. Analisis Tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
3. Analisis Persentase per-Komponen (common size), merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.
4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.
5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
6. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.
7. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
8. Analisis Break Even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

3.1.3. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Tujuan pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Mardiasmo (2002:121) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik.
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

3.1.4. Komponen Keuangan Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut:

- a. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga

suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

- a. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- b. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;

- d. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan

kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset nonlancar).

Konsekuensi dari penggunaan sistem berbasis akrual pada penyusunan neraca menyebabkan setiap entitas pelaporan harus mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Sedangkan informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut: (1) kas dan setara kas; (2) investasi jangka pendek; (3) piutang pajak dan bukan pajak; (4) persediaan; (5) investasi jangka panjang; (6) aset tetap;

(7) kewajiban jangka pendek; (8) kewajiban jangka panjang; dan (9) ekuitas.

6. Laporan Arus Kas

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Kas adalah uang baik yang dipegang secara tunai oleh bendahara maupun yang disimpan pada bank dalam bentuk tabungan/giro. Sedangkan setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas)

7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Secara umum, susunan CaLK sebagaimana dalam Standar Akuntansi Pemerintahan disajikan sebagai berikut:

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan;
- d. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan

3.1.5. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Helfert (1982) dalam Mohamad Mahsun (2012:135), Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu

dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Abdul Halim 2007:L-4).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah sebagai berikut: DPRD, pihak eksekutif, pemerintah pusat/provinsi, serta masyarakat dan kreditor (Abdul Halim 2007:L-4).

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah : Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

a. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi 2010:143). Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mohammad Mahsun (2012:187), adalah:

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan

target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Abdul Halim 2007:234). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
100%	Efisiensi Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber : Mohamad Mahsun (2012:187)

c. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Abdul Halim 2007:236). Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi

belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Mahmudi 2010:164). Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi 2010:164). Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belum ada ketentuan pasti berapa besarnya Rasio Belanja Modal dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan

besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi 2010:138). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Abdul Halim 2007:241). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Keterangan :

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/
Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

$P0 = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi}}{\text{yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)}}$

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

e. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Abdul Halim 2007:L-5). Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan Ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Reksohadiprojo dan Thoha dalam Hermi Oppier (2013:82)

- 1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Perhitungan dengan Metode Rasio

Analisis Kinerja Keuangan Daerah DPPKAD Kabupaten Kebumen dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan DPPKAD Kabupaten Kebumen dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2010-2014. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Kebumen pada penelitian ini adalah: Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen yang didapat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kebumen. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja

Keuangan Kabupaten Kebumen. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah :

1. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Penghitungan Rasio Efektivitas PAD DPPKAD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	REPAD	Kriteria
2010	60.151.533.000,00	58.742.305.659,00	97,66	Tidak Efektif
2011	70.892.281.000,00	73.513.164.444,00	103,70	Efektif
2012	90.896.840.000,00	102.374.370.560,00	112,63	Efektif
2013	116.720.489.000,00	131.481.736.502,00	112,65	Efektif
2014	0	4.800.000,00	0	Tidak Efektif

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Kebumen (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 9. dapat diketahui bahwa Efektivitas Keuangan DPPKAD Kabupaten Kebumen pada tahun 2010 & 2014 tidak efektif, karena nilai yang diperoleh masih di bawah 100% yaitu 97,66% dan 0%. Untuk tahun 2011, 2012 dan 2013

sudah efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu 103,70%, 112.63% dan 112,65%.

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah DPPKAD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	REKD	Kriteria
2010	1.010.051.969.778,00	978.097.201.472,00	103,27	Tidak Efisien
2011	1.216.956.106.123,00	1.273.275.623.110,00	95,58	Efisien
2012	1.412.496.990.997,00	1.446.685.447.262,00	97,63	Efisien
2013	1.548.176.706.140,00	1.626.530.654.021,00	95,18	Efisien
2014	119.980.993.721,00	1.724.973.077.062,00	6,95	Efisien

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Kebumen (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 10. di atas dapat diketahui bahwa Efisiensi Keuangan Daerah DPPKAD Kabupaten Kebumen pada tahun 2010 tergolong efisien karena nilai rasionya kurang dari

100%. Total belanjanya melebihi total pendapatan daerah. Pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 efisiensinya tergolong Efisien yaitu sebesar 95,58; 97,63; 95,18 dan 6,95. Hal ini diakibatkan terjadinya selisih yang cukup besar antara pendapatan dengan belanja.

3. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Penghitungan Rasio Keserasian DPPKAD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010-2014 (Belanja Operasi)

Tahun Anggaran	Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2010	1.010.051.969.778,00	890.343.021.614,00	88,15
2011	1.216.956.106.123,00	989.277.111.579,00	81,29
2012	1.412.496.990.997,00	1.064.841.870.404,00	75,39
2013	1.548.176.706.140,00	1.191.647.569.927,00	76,97
2014	119.980.993.721,00	39.648.358.344,00	33,05

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Kebumen (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 11. di atas dapat diketahui bahwa rata-rata Rasio Keserasian Belanja Operasi DPPKAD Kabupaten Kebumen sebesar 70,97%. Pada tahun 2010 rasionya sebesar 88,15%, kemudian pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 81,29%, dan mengalami penurunan kembali di tahun 2012 menjadi 75,39%. Periode tahun 2013, rasionya meningkat menjadi 76,97% dan mengalami penurunan kembali di tahun 2014 menjadi 33,05%. Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6. Penghitungan Rasio Keserasian DPPKAD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010-2014 (Belanja Modal)

Tahun	Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Rasio Belanja Modal
2010	1.010.051.969.778,00	118.771.773.531,00	11,76
2011	1.216.956.106.123,00	187.137.769.539,00	15,38
2012	1.412.496.990.997,00	295.209.004.417,00	20,9
2013	1.548.176.706.140,00	286.958.914.202,00	18,54
2014	119.980.993.721,00	0	0

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Kebumen (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 12. di atas dapat diketahui bahwa rata-rata Rasio Keserasian Belanja Modal DPPKAD Kabupaten Kebumen sebesar 13,32%. Pada tahun 2010 rasionya sebesar 11,76%, kemudian mengalami peningkatan menjadi 15,38% pada tahun 2011. Tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 20,9%, namun pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 18,54%, dan kembali mengalami penurunan menjadi 0%.

4. Rasio Pertumbuhan

Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{Pn - P0}{P0}$$

Keterangan :

r = Rasio Pertumbuhan

Pn = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P0 = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Rasio Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya, baik dilihat dari sumber pendapatan maupun pengeluaran. Hasil dari perhitungan dari Rasio Pertumbuhan dapat di lihat di tabel di bawah ini :

Tabel 7. Penghitungan Rasio Pertumbuhan DPPKAD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010-2014

Keterangan	TAHUN					RATA- RATA
	2010	2011	2012	2013	2014	
PAD	58.742.305.659,00	73.513.164.444,00	102.374.370.560,00	131.481.736.502,00	4.800.000,00	73.223.275.433,00
Pertumbuhan PAD	-6,78%	25,15%	39,26%	28,43%	-99,99%	-2,79%
Pendapatan	978.097.201.472,00	1.273.275.623.110,0	1.446.685.447.262,00	1.626.530.654.021,00	1.724.973.077.062,00	1.409.912.400.585,400
Pertumbuhan Pendapatan	11,08%	30,18%	13,62%	12,43%	6,05%	14,66%
Belanja Operasi	890.343.021.614,00	989.277.111.579,00	1.064.841.870.404,00	1.191.647.569.927,00	39.648.358.344,00	835.151.586.373,600

Pertumbuhan B.Operasi	13,30%	11,11%	7,64%	11,91%	-96.67%	-10,54%
--------------------------	--------	--------	-------	--------	---------	---------

Tabel 8. Penghitungan Rasio Pertumbuhan DPPKAD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010-2014(lanjutan)

Keterangan	TAHUN					RATA- RATA
	2010	2011	2012	2013	2014	
Belanja Modal	118.771.773.531,00	187.137.769.539,00	295.209.004.417,00	286.958.914.202,00	0	177.615.492.337,800
Pertumbuhan B.Modal	-25,47	57,56%	57,75%	-2,79%	-100%	-2.59%

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Kebumen (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan positif meskipun fluktuatif. Mengalami pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2012 sebesar 39,26%. Pendapatan Daerah juga mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 14,66%. Belanja Operasi rata-rata pertumbuhannya sebesar -10,54%, dan pertumbuhan rata-rata Belanja Modal sebesar -2.59%.

5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RKKD = \frac{PAD}{PendapatanTransfer} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Hasil dari perhitungan dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 9. Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah DPPKAD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	RKKD (%)	Pola Hubungan
2010	58.742.305.659,00	855.221.170.580,00	6,87	instruktif
2011	73.513.164.444,00	991.930.642.660	7,41	instruktif
2012	102.374.370.560,00	1.276.155.750.396,00	8,02	instruktif
2013	131.481.736.502,00	1.495.048.917.519,00	8,79	instruktif
2014	4.800.000,00	1.233.776.681.950,00	0,00039	instruktif

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Kebumen (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas kemampuan keuangan DPPKAD Kabupaten Kebumen tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Nilai terendah terjadi pada tahun 2014 dimana nilainya sebesar 0,00039% dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,79%. Tahun tahun lainnya yaitu tahun 2010, 2011, dan 2012 masing-masing sebesar : 6,87%, 7,41%, dan 8,02%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi.

3.2.2. Penjelasan Metode Rasio

1. Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD menunjukkan bahwa anggaran PAD Kabupaten Kebumen rata-rata selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 PAD dianggarkan sebesar Rp. 60.151.533.000,00 atau 6,07% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2011 PAD dianggarkan sebesar Rp 70.892.281.000,00 atau 5,57% dari total anggaran pendapatan. Kemudian pada tahun 2012 anggaran PAD dinaikan menjadi Rp. 90.896.840.000,00 atau 6,41% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2013 anggaran PAD kembali naik menjadi Rp 116.720.489.000,00 atau 7,3% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2014 anggaran PAD turun menjadi Rp 0,00 atau 0% dari total anggaran pendapatan.

Realisasi PAD Kabupaten Kebumen dari tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2010 PAD Kabupaten Kebumen sebesar Rp 58.742.305.659,00 atau sebesar 6% dari total pendapatan. Mengalami kenaikan pada tahun 2011 yaitu menjadi Rp 73.513.164.444,00 atau sebesar 5,77% dari total pendapatan. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 102.374.370.560,00 atau sebesar 7% dari total pendapatan. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 131.481.736.502,00 atau 8% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2013 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 4.800.000,00 atau 0,00028% dari total pendapatan

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD dapat diketahui bahwa Efektivitas PAD Keuangan DPPKAD Kabupaten Kebumen pada tahun 2010 sebesar 97,66%, tahun 2011 sebesar

103,7%, tahun 2012 sebesar 112,63%, tahun 2013 sebesar 112,65%, dan tahun 2014 sebesar 0%. Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Kebumen untuk tahun 2010 dan 2014 berjalan Tidak Efektif karena efektivitasnya masih dibawah 100% . Untuk tahun 2011, 2012, dan 2013 sudah Efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100%.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Kebumen belum Efektif karena rata-rata efektivitasnya kurang dari 100% yaitu 85,33%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2014 mengalami kemunduran PAD. Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan kecuali pada tahun 2010 dan 2014, namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Dalam penelitian ini di Kabupaten Kebumen kinerja pengelolaan keuangannya juga sudah efektif. Daerah ini dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Akan tetapi masing-masing daerah diharapkan untuk tidak selalu terpaku dengan target yang telah mereka tentukan sebelumnya dan selalu memaksimalkan potensi-potensi PAD di daerah

tersebut sehingga bisa melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui realisasi total pendapatan daerah Kabupaten Kebumen dari tahun 2010 sampai dengan 2014 rata-rata mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 pendapatan daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 978.097.201.472,00 pada tahun 2010. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2011 menjadi Rp 1.273.275.623.110,00. Dan pada tahun 2012 terjadi kenaikan lagi belanja daerah menjadi Rp 1.446.685.447.262,00, naik kembali pada tahun 2013 menjadi Rp 1.626.530.654.021,00, dan tahun 2014 naik kembali menjadi Rp 1.724.973.077.062,00.

Total Belanja daerah Kabupaten Kebumen dari tahun 2010 sampai dengan 2014 selalu mengalami kenaikan. Berawal dari tahun 2010 total belanja daerah sebesar Rp. 1.010.051.969.778,00. Pada tahun 2011 total belanja daerah sebesar Rp 1.216.956.106.123,00 naik dari tahun sebelumnya, kemudian tahun berikutnya tahun 2012 naik menjadi Rp. 1.412.496.990.997,00. Pada tahun 2013 juga mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.548.176.706.140,00. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi Rp 119.980.993.721,00.

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah juga diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2010 sampai dengan 2014 sebesar 79,72% atau dapat dikatakan Efisien. Pada tahun 2010 Rasio Efisiensinya sebesar 103,27%, kemudian tahun 2011 menjadi 95,58%, tahun 2012 sebesar 97,63%, tahun 2013 sebesar 95,18%, dan tahun 2014 sebesar 6,95.

Rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen tergolong Efisien karena rata-rata rasionya 79,72%, meskipun pada tahun awal total belanja daerahnya masih lebih besar daripada pendapatan daerahnya yaitu pada tahun 2010. Meskipun rata-rata Efisiensinya sudah efisien, biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk memperoleh pendapatannya masih cukup besar. Dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Jusmawati (2011), dijelaskan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah adalah efisien. Hal tersebut sama dengan hasil penelitian ini, dimana efisiensi keuangan daerah Kabupaten Kebumen juga sudah Efisien. Hal tersebut terjadi karena Pemerintah Kabupaten Soppeng maupun Kebumen bisa menekan jumlah Belanja daerahnya dan mampu menyeimbangkan Pendapatan dan Belanja daerahnya dengan baik.

3. Rasio Keserasian

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Keserasian dapat diketahui bahwa realisasi Total Belanja daerah Kabupaten Kebumen dari tahun 2010 sampai dengan 2014 selalu mengalami kenaikan. Berawal dari tahun 2010 total belanja daerah sebesar Rp 1.010.051.969.778,00. Pada tahun 2011 total belanja daerah sebesar Rp 1.216.956.106.123,00 naik dari tahun sebelumnya, kemudian tahun berikutnya tahun 2012 naik menjadi Rp. 1.412.496.990.997,00. Pada tahun 2013 turut mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.548.176.706.140,00. Namun,

angka tersebut mengalami penurunan menjadi Rp. 119.980.993.721,00.

Total Realisasi Belanja Operasi daerah yang terdiri atas : Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Bantuan Keuangan selalu terjadi peningkatan dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Masing-masing sebesar: Rp. 890.343.021.614,00; Rp. 989.277.111.579,00; Rp. 1.064.841.870.404; Rp. 1.191.647.569.927,00; dan Rp. 39.648.358.344,00. Total Realisasi Belanja Modal yang terdiri atas : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset tetap lainnya, dan Belanja Aset Lainnya mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan terjadi pada tahun 2014, sedangkan tahun-tahun lainnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Dari perhitungan Rasio Keserasian tersebut dapat dilihat bahwa Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal yang belum stabil dari tahun ke tahun. Dimulai pada tahun 2010 Rasio Belanja Operasinya sebesar 88,15% mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 81,29%, dan pada tahun 2012 turun lagi menjadi 75,39%. Mengalami kenaikan menjadi 76,97% di tahun 2013 dan setelahnya menurun menjadi 33,05% pada tahun 2014, sehingga rata-rata rasionya sebesar 70,97%. Rasio Belanja Modal pada tahun 2010 sebesar 11,76% naik menjadi 15,38% pada tahun 2011 dan naik lagi pada tahun 2012 menjadi 20,9%. Pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 18,54% dan selanjutnya menurun menjadi 0% di tahun 2014 sehingga rata-rata rasionya sebesar 13,32%.

Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk

kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kabupaten Kebumen kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Bahrun Assidiqi (2014) di Kabupaten Klaten, alokasi Belanja Operasinya lebih besar dibandingkan dengan Belanja Modalnya. Hal tersebut sama dengan penelitian ini, alokasi Belanja Operasi Kabupaten Kebumen juga lebih tinggi dibandingkan dengan Belanja Modalnya. Hal itu hampir sama dengan apa yang terjadi di sebagian besar kabupaten di Indonesia.

4. Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Pertumbuhan Pendapatan dapat diketahui bahwa selalu terjadi kenaikan pendapatan daerah dari tahun 2010 sampai tahun 2014 di Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2010 pendapatan daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 978.097.201.472,00, mengalami kenaikan pada tahun 2011

menjadi Rp. 1.273.275.623.110,00. Dan pada tahun 2012 terjadi kenaikan lagi belanja daerah menjadi Rp 1.446.685.447.262,00, naik kembali pada tahun 2013 menjadi Rp 1.626.530.654.021,00. Setelah itu, pertumbuhannya menurun menjadi Rp 1.724.973.077.062,00 di tahun 2014.

Jika dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun yang selalu mengalami kenaikan maka dapat dikatakan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Kebumen mengalami pertumbuhan secara positif. Tahun 2010 sebesar 11,08%, tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 30,18%. Tahun 2012 sebesar 13,62%, tahun 2013 sebesar 12,43% dan tahun 2014 sebesar 6,05%.

Upaya pemerintah Kabupaten Kebumen untuk selalu meningkatkan pendapatan daerahnya bisa dikatakan berhasil meskipun sebagian besar pendapatannya masih bersumber dari bantuan dari pihak pusat. PAD masih kecil dibandingkan dengan bantuan dari pusat. Agar kedepannya kinerja daerah bisa meningkat dan optimal lagi maka seharusnya pemerintah Kabupaten Kebumen selalu mengoptimalkan pendapatan daerahnya dari sektor PAD.

Realisasi PAD Kabupaten Kebumen dari tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2010 PAD Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 58.742.305.659,00 atau sebesar 6% dari total pendapatan. Pada tahun 2011 PAD Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan menjadi Rp 73.513.164.444,00 atau sebesar 5,77% dari total pendapatan. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 102.374.370.560,00 atau sebesar 7% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2013 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 131.481.736.502,00 atau 8% dari total pendapatan dan menurun pada tahun 2014 sebesar Rp. 4.800.000,00 atau 100% dari total pendapatan.

Berdasarkan penghitungan Rasio Pertumbuhan PAD, PAD Kabupaten Kebumen fluktuatif, rata-rata Rasio Pertumbuhan PAD dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebesar -2,79%. Tahun 2010 sebesar -6,78%. Sempat mengalami pertumbuhan sebesar 25,15% pada tahun 2011, mengalami pertumbuhan lagi sebesar 39,26% di tahun 2012 dan menurun pada tahun berikutnya menjadi 28,43%. Penurunan terparah terjadi pada tahun 2014 sebesar -99,99%. Pemerintah Kabupaten Kebumen harus selalu meningkatkan PAD nya dengan cara mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimilikinya. Akan lebih baik apabila tidak terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat agar bisa mandiri mengelola daerahnya dengan PAD yang tinggi.

Total Realisasi Belanja Operasi daerah yang terdiri atas : Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Bantuan Keuangan selalu terjadi peningkatan dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Masing-masing sebesar : Rp. 890.343.021.614,00; Rp. 989.277.111.579,00; Rp. 1.064.841.870.404; Rp. 1.191.647.569.927,00; dan Rp. 39.648.358.344,00. Total Realisasi Belanja Modal yang terdiri atas : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset tetap lainnya, dan Belanja Aset Lainnya mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan terjadi pada tahun 2011, 2012, dan 2014, sedangkan tahun-tahun lainnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2010 sebesar 13,30%, tahun 2011 sebesar 11,11%. Tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 7,64%, tahun 2013 naik sebesar 11,91% dan tahun 2014 mengalami penurunan drastis sebesar -96,67%. Rata-rata

pertumbuhannya sebesar -10,54%. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal juga mengalami kenaikan dan penurunan, tahun 2010 sebesar -25,47% dan mulai naik menjadi 57,56% pada tahun 2011. Kemudian meningkat sebesar 57,75% pada tahun 2012 dan turun menjadi -2,79% pada tahun 2013. Kemudian turun drastis menjadi -100% pada tahun 2014. Sehingga rata-rata pertumbuhannya sebesar -2,59%.

Jika dilihat dari perkembangan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi dan Modal bisa dikatakan baik, terutama pertumbuhan Rasio Belanja Modal yang selalu mengalami kenaikan meskipun pada kenyataannya proporsi jumlahnya masih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah Belanja Operasi. Apabila pemerintah daerah berani mengurangi Belanja Operasinya untuk dialokasikan ke Belanja Modal maka dapat dikatakan Pemerintah Daerah tersebut mengutamakan pembangunan di daerahnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Bahrun Assidiqi (2014) di Kabupaten Klaten, Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan belanja daerahnya selalu mengalami perkembangan secara positif karena selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berbeda dengan yang terjadi pada penelitian di Kebumen, dimana rasionya selalu berubah naik turun dari tahun ke tahun. Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu meniru kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.

5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, diketahui jika realisasi PAD Kabupaten Kebumen dari tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2010 PAD Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 58.742.305.659,00 atau sebesar 6% dari total pendapatan. Pada tahun 2011 PAD Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan menjadi Rp. 73.513.164.444,00 atau sebesar 5,77% dari total pendapatan. Pada

tahun 2012 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp. 102.374.370.560,00 atau sebesar 7% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2013 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 131.481.736.502,00 atau 8% dari total pendapatan dan kembali menurun menjadi Rp. 4.800.000,00 pada tahun 2014. Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 sebesar Rp. 855.221.170.580,00, kemudian pada tahun 2011 sebesar 991.930.642.660 atau naik 3,84% dari tahun sebelumnya, kemudian mengalami peningkatan sebesar 10,58% atau menjadi 1.276.155.750.396,00 pada tahun 2012. Pada tahun 2013 kembali mengalami kenaikan sebesar 22,65% atau menjadi 1.495.048.917.519,00. Sedangkan, di tahun 2014 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.233.776.681.950,00. Untuk peningkatan pendapatan dari pihak ekstern ini meningkat karena adanya peningkatan pada pos-pos dana perimbangan dari pemerintah pusat seperti : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan DAK (Dana Alokasi Khusus).

Berdasarkan hasil perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah kemampuan keuangan DPPKAD Kabupaten Kebumen tergolong Rendah Sekali dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instrukturif di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Terjadi kenaikan maupun penurunan dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Berawal pada tahun 2010 Rasio Kemandirian sebesar 6,87%, kemudian naik menjadi 7,41% pada tahun 2011. Peningkatan kembali pada tahun 2012 sebesar 8,02%. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan menjadi 8,79% dan

mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 0,00039%. Jika dilihat dari tahun ke tahun pola kemandirian keuangannya masih tergolong pola hubungan Instruktif karena masih tergolong dalam interval 0% - 25% dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri.

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama lima tahun pada Pemerintah Kabupaten Kebumen memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong Rendah Sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0% - 25%. Rasio Kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kebumen dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

Jadi Kemandirian Keuangan DPPKAD Kabupaten Kebumen secara keseluruhan dapat dikatakan rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Kebumen sedikit dan belum dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah

harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah Agustin (2007) Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Blitar jika dilihat dari Rasio Kemandirian tergolong pola hubungan Instrukturif. Menurut Fitriyah Agustin penyebab terjadinya hal tersebut hampir sama apa yang dijelaskan pada penelitian ini dimana kedua daerah ini yaitu Kabupaten Blitar dan kabupaten Kebumen masih mengandalkan bantuan dari pemerintah baik pusat maupun provinsi dan belum mampu untuk mengolah potensi penerimaan di daerahnya. Kedua Pemerintah Daerah Kediri maupun Kebumen diharapkan selalu memaksimalkan potensi PAD yang ada, sehingga tidak selalu bergantung kepada bantuan dari pusat saja.